



**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

# PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL 2023

**Abdurohman**  
**Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF**

**KAPj Goes to Campus: Economic & Taxation Outlook**  
**Year 2023**  
**25 Januari 2023**





01

## Perkembangan Perekonomian Global dan Domestik

02

Capaian APBN 2022 & Kerangka APBN  
2023

03

Reformasi & Arah Kebijakan  
Perpajakan



# BERBAGAI SYOK TELAH MEMBERIKAN TANTANGAN PADA PEREKONOMIAN GLOBAL DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

**Pandemi  
COVID-19**

**Tensi  
Geopolitik**

**Disrupsi  
Rantai  
Pasok**

**Inflasi  
Tinggi dan  
Persisten**

**Kenaikan  
Suku Bunga  
&  
Pengetatan  
Likuiditas**

**Financial  
Contagion /  
Stress**

**Kerawana  
n Energi  
& Pangan**

**Fragmentasi  
Perdagangan  
Global,  
Investasi, dan  
*Financial  
Networks***

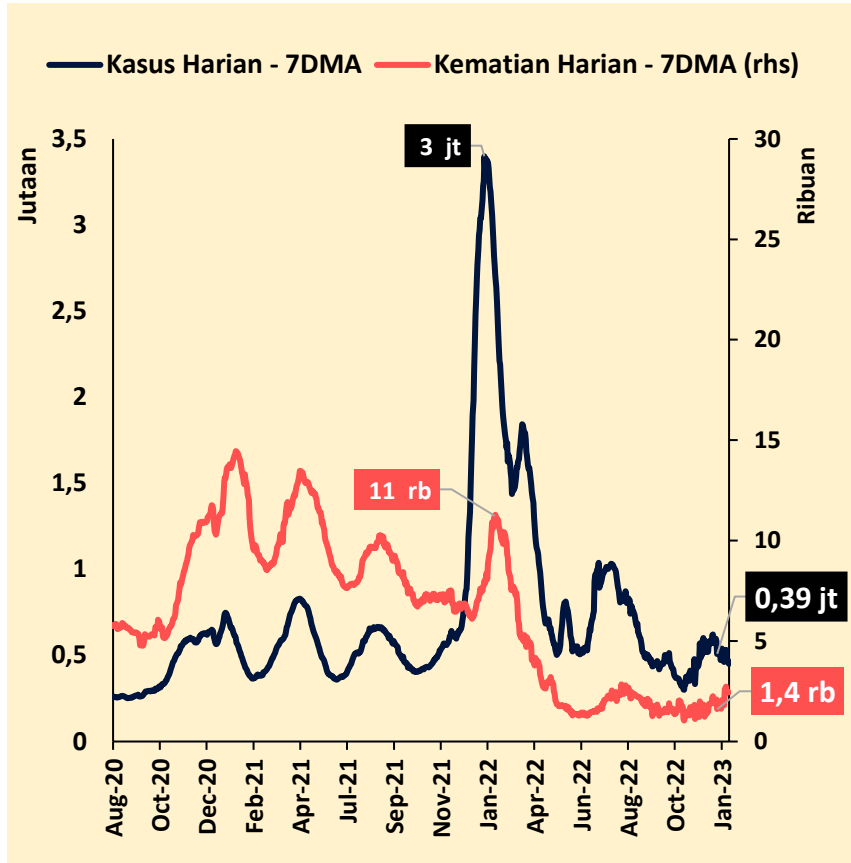
**Bencana  
terkait  
Perubahan  
Iklim**

**Perlambatan  
Prospek  
Pertumbuha  
n Jangka  
Menengah**

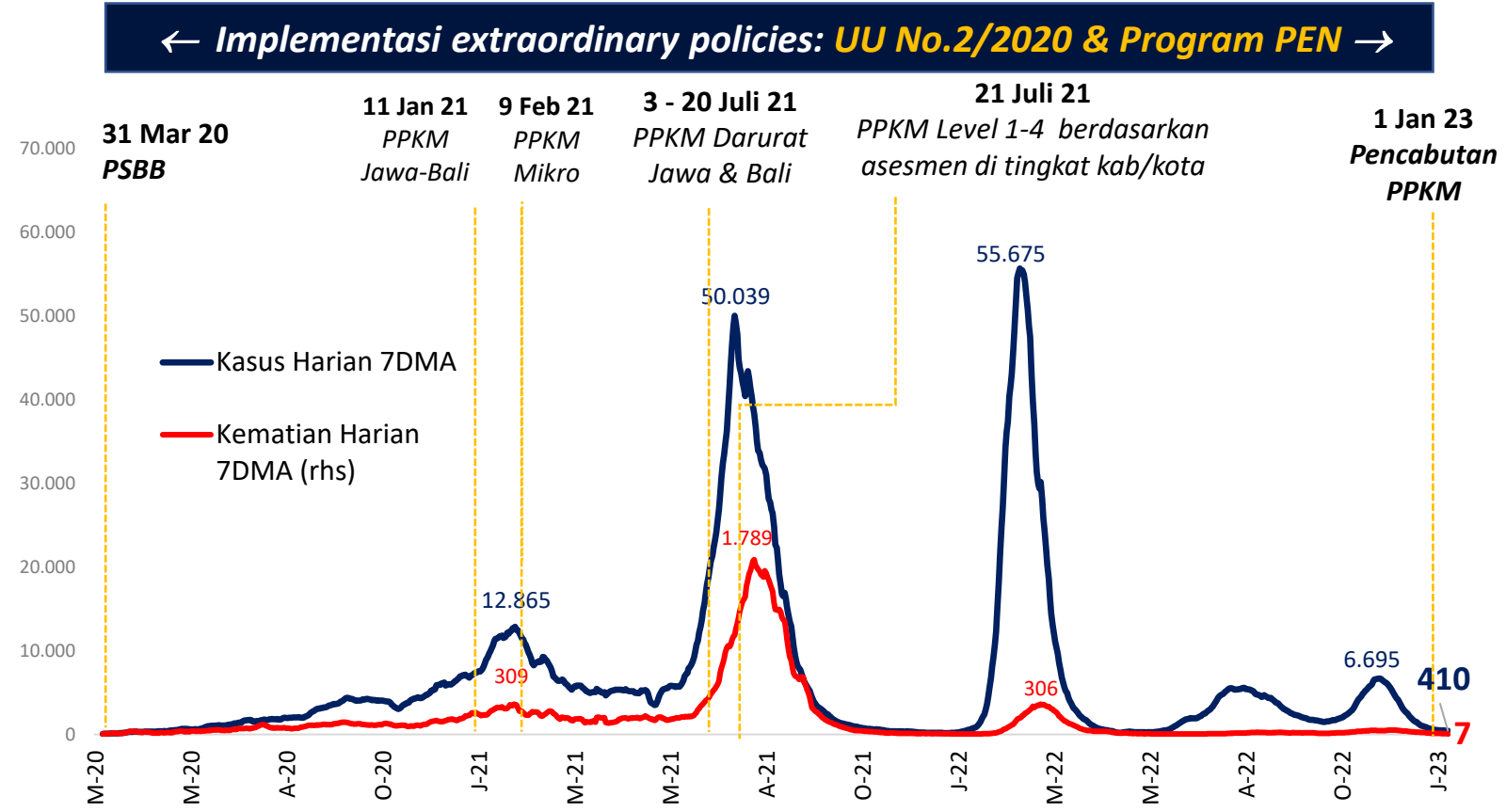
# TIGA TAHUN PANDEMI COVID-19: BERBAGAI KEBIJAKAN EXTRAORDINARY MAMPU MENGENDALIKAN PENULARAN DAN MENOPANG PEMULIHAN



## Perkembangan Covid-19 Dunia



## Perkembangan Covid-19 Indonesia



Pandemi Covid-19 dunia semakin terkendali, restriksi terus longgar

Penanganan pandemi Indonesia mendapat pengakuan internasional

Kebijakan extraordinary berhasil mendukung pengendalian pandemi, memulihkan ekonomi, & memberi bantalan bagi masyarakat serta dunia usaha terdampak

# HARGA KOMODITAS GLOBAL MASIH VOLATIL, NAMUN MULAI MENURUN



Moderasi harga mulai terjadi, didorong perbaikan supply dan ekspektasi pelemahan ekonomi global

**Tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi**



**Disrupsi supply**

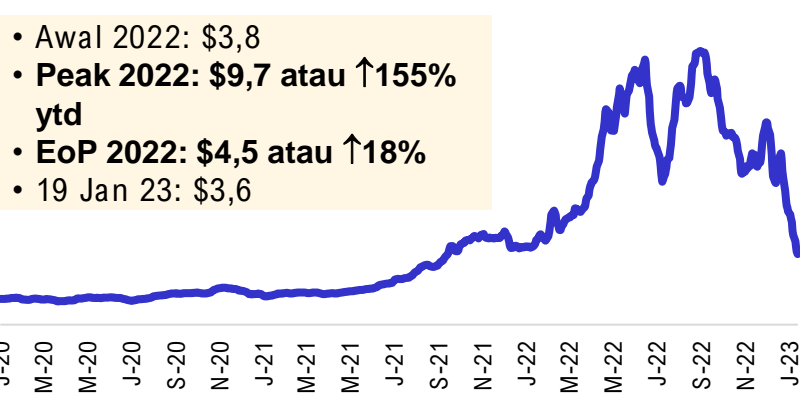


**Tensi geopolitik**

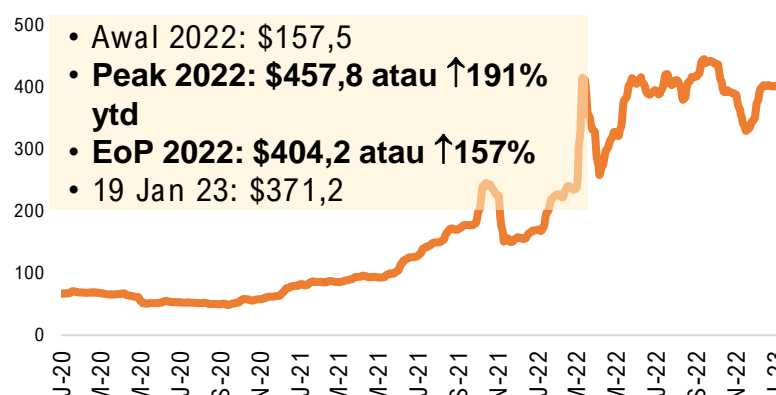


**Lonjakan harga komoditas**

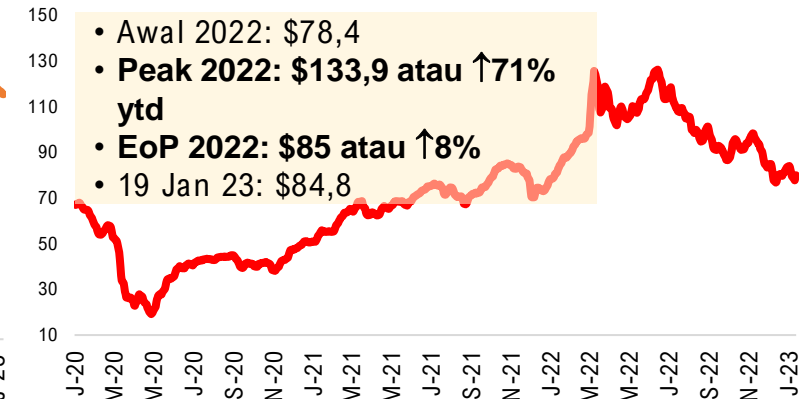
**Natural Gas 5dma (US\$/MMBtu)**



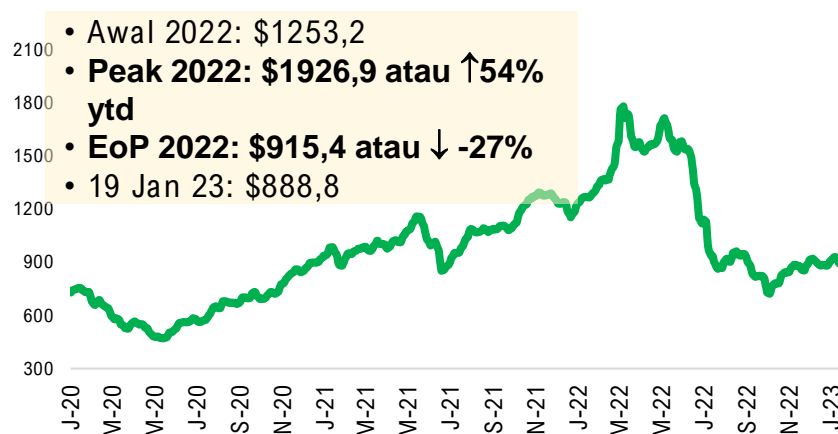
**Coal 5dma (US\$/Metric Ton)**



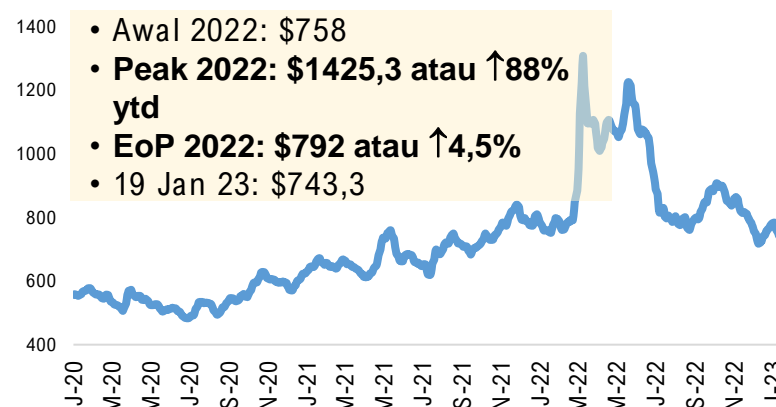
**Brent 5dma (US\$/barrel)**



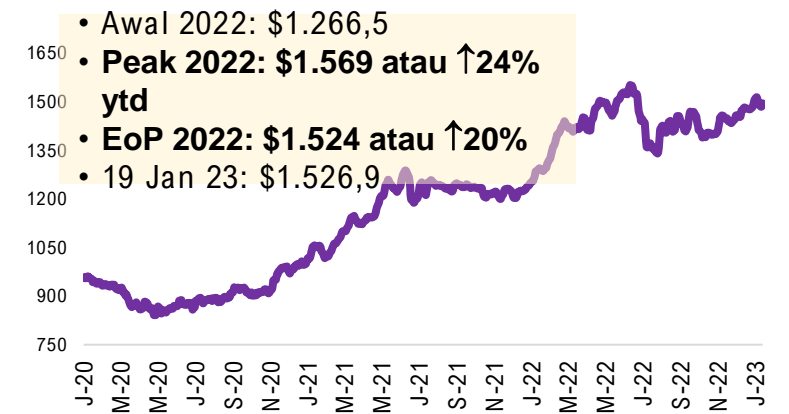
**CPO 5dma (US\$/Ton)**



**Wheat 5dma (US\$/Bushels)**



**Soybean 5dma (US\$/Bushels)**

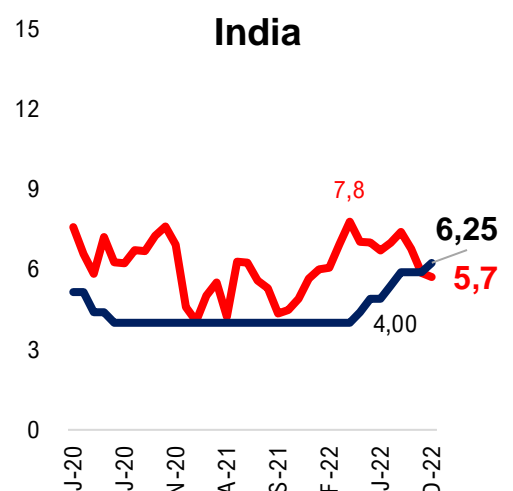
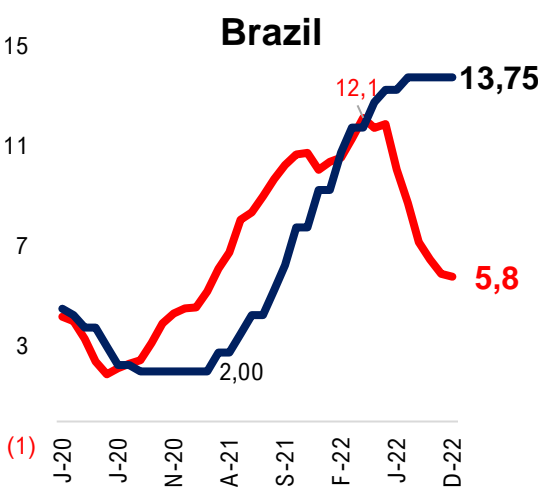
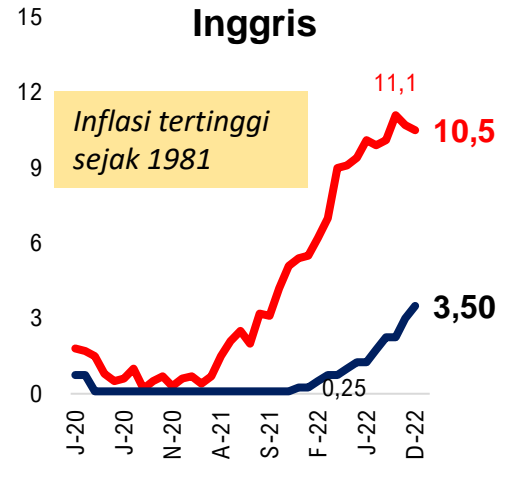
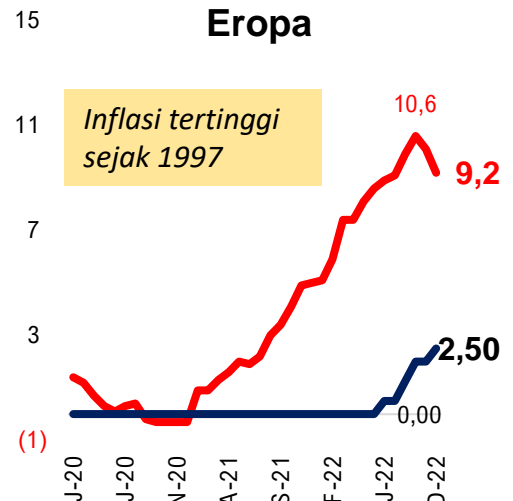
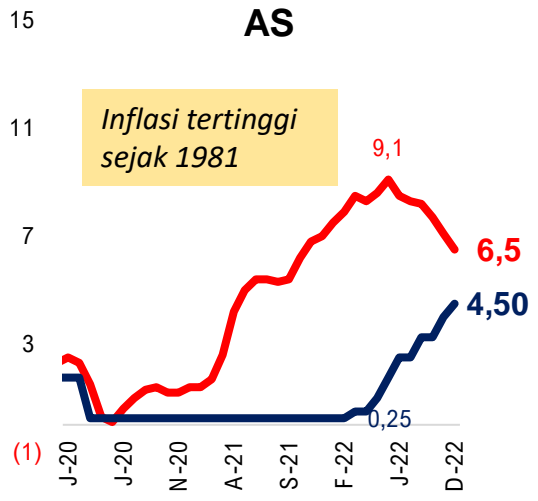


# TEKANAN INFLASI TINGGI, MEMICU PENGETATAN MONETER AGRESIF

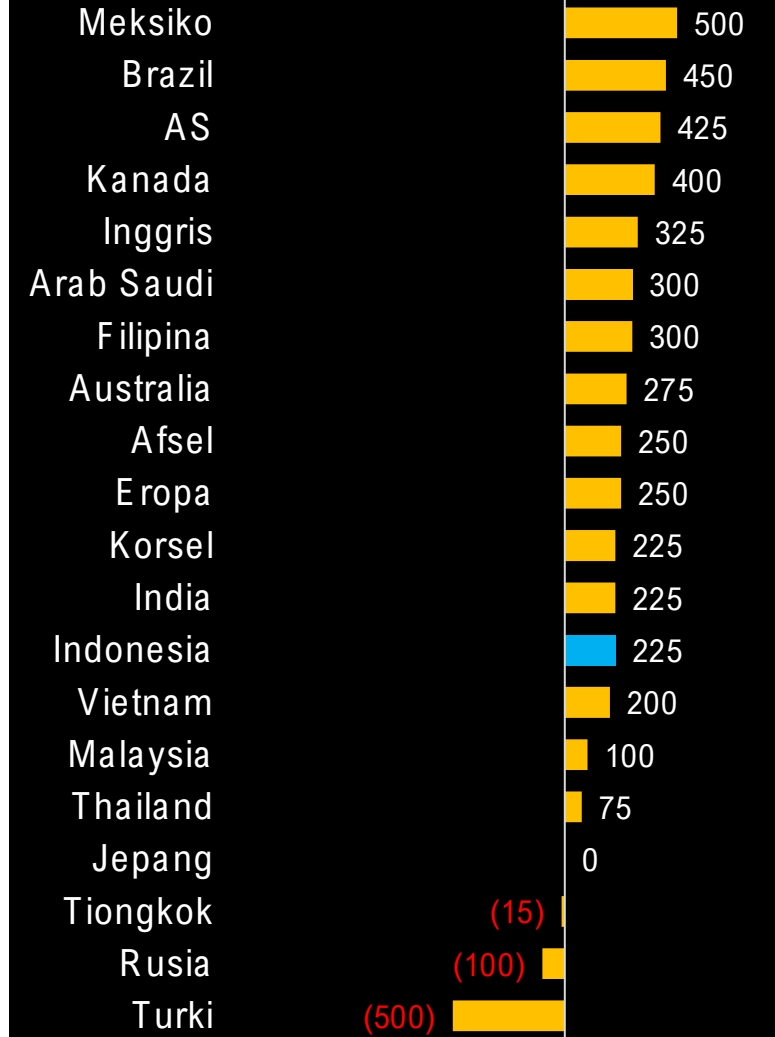


Inflasi di negara maju bahkan mencapai rekor dalam beberapa dekade terakhir

— Inflasi (% , yoy)      — Suku bunga acuan (%)



## Kenaikan/Penurunan Suku Bunga Acuan Sejak Tahun 2022 (basis poin)



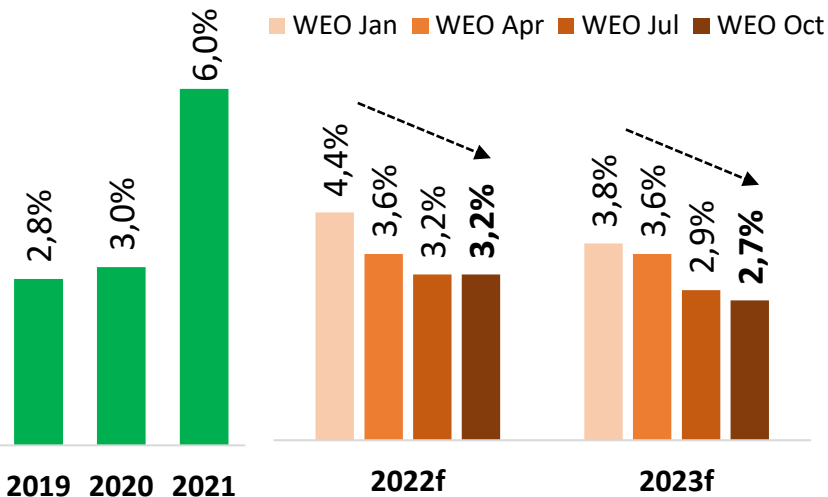
Sumber: Bloomberg, 19 Jan 2023



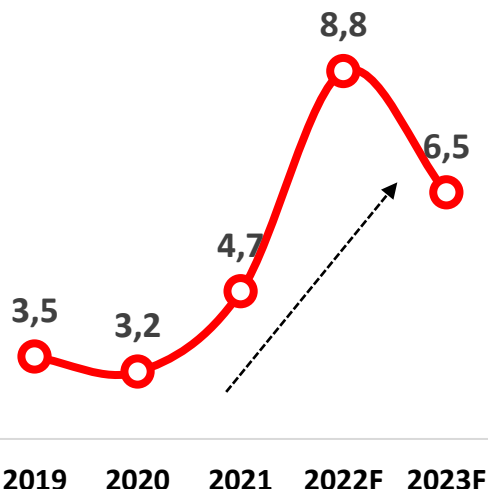
# TEKANAN INFLASI YANG TINGGI & LIKUIDITAS YANG KETAT MENDORONG PELEMAHAN *OUTLOOK* PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL

Proyeksi pertumbuhan global semakin direvisi turun meskipun India dan ASEAN-5 diproyeksikan relatif resilien

## Proyeksi Pertumbuhan Global (% yoy)



## Proyeksi Inflasi Global (% yoy)



### Upside risks:

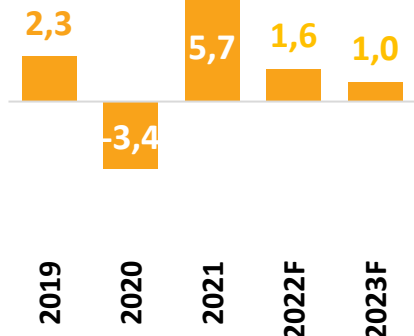
- Moderasi harga komoditas
- Relasasi restriksi Covid-19 di Tiongkok
- Penguatan pemulihan di beberapa negara Asia (i.e. India & ASEAN-5)

### Downside risks:

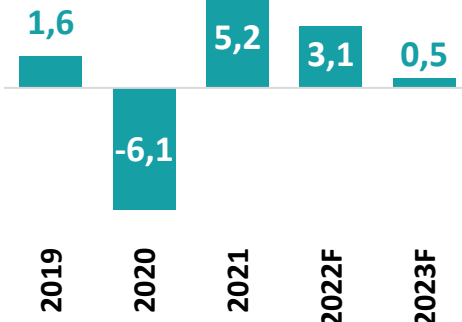
- Peningkatan tensi geopolitik
- Inflasi global yang persisten
- Pelemahan aktivitas ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa
- Policy space yang semakin sempit (fiskal dan moneter)
- Penguatan Dollar AS yang masih berlanjut

## Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Berbagai Negara Utama (% YoY)

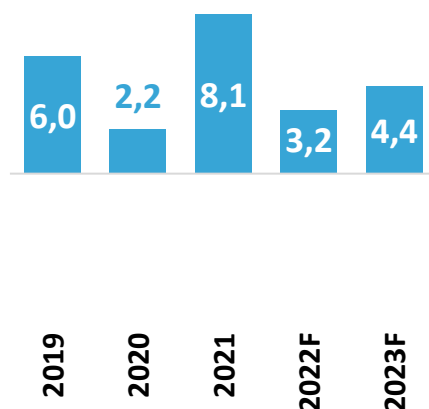
### USA



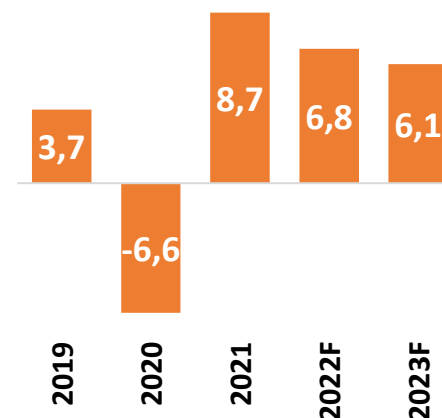
### Euro Zone



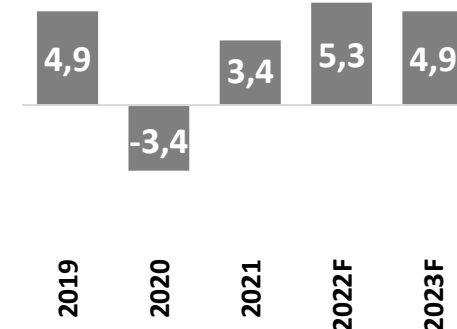
### China



### India



### ASEAN-5

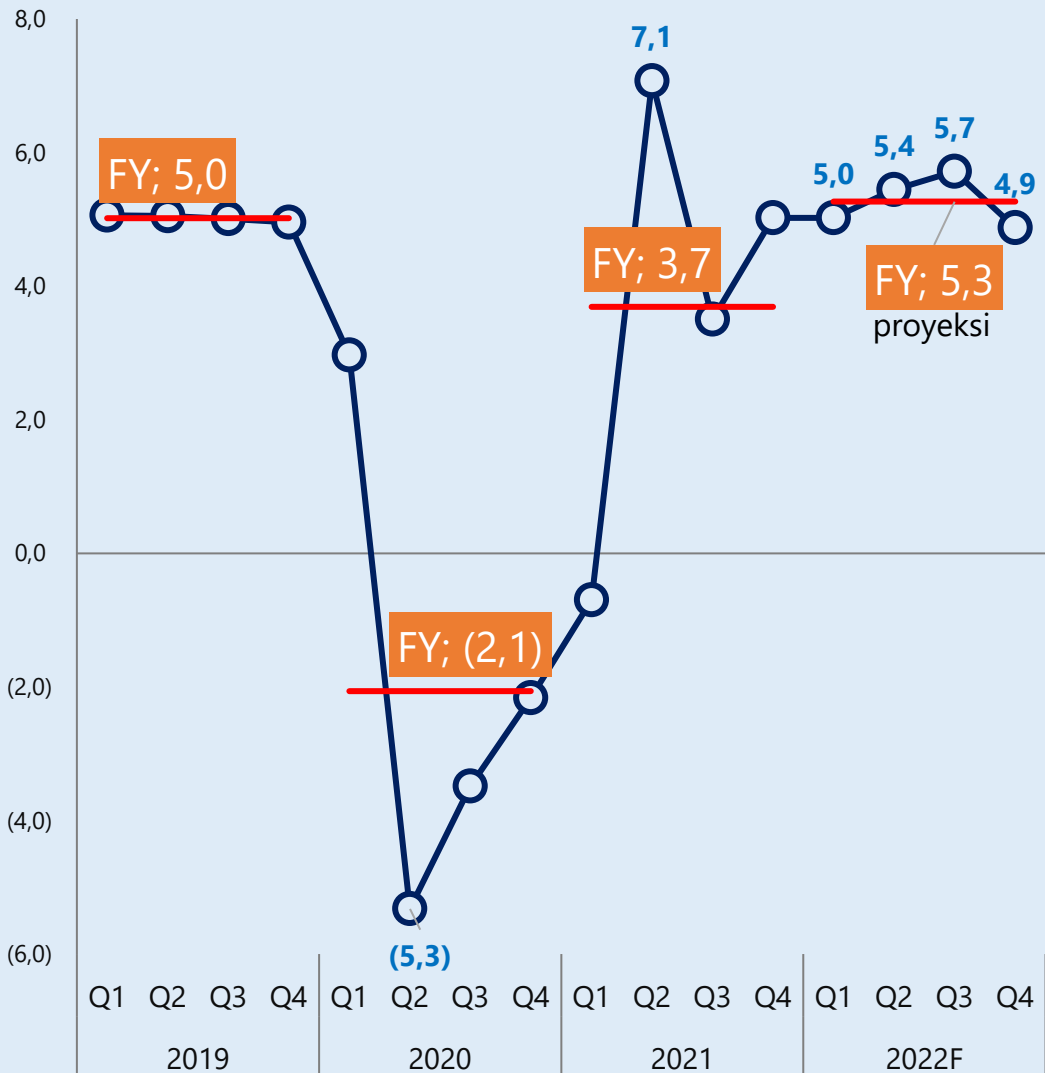


# PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TERUS MENGUAT DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

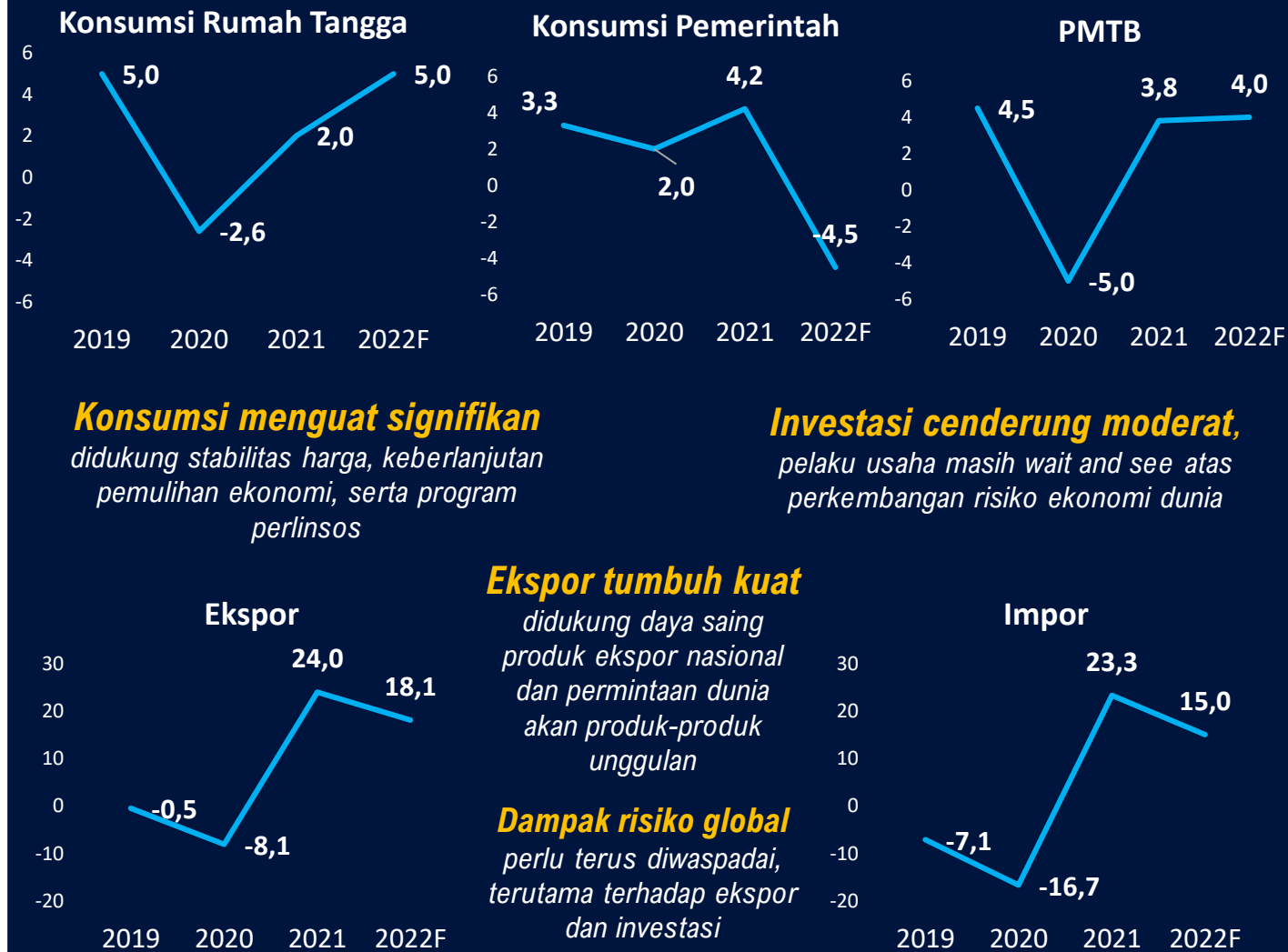


Namun, moderasi diperkirakan terjadi pada tahun 2023 sejalan dengan melemahnya kinerja pertumbuhan global

## Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)



## Pertumbuhan Tahunan Per Komponen Pengeluaran (%)



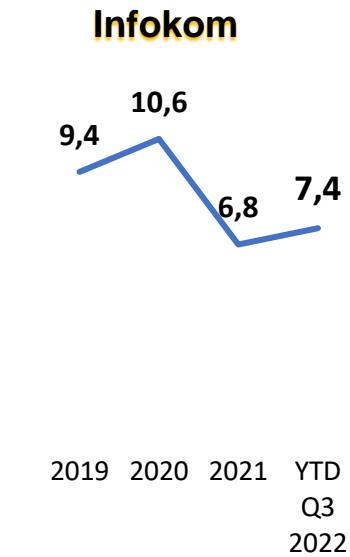
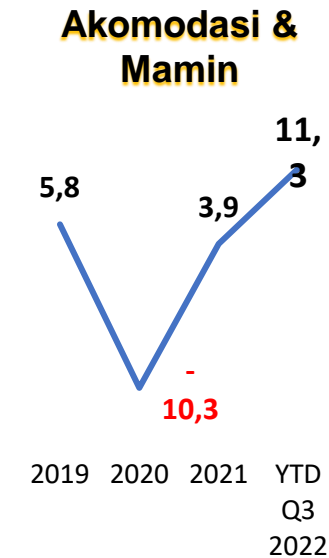
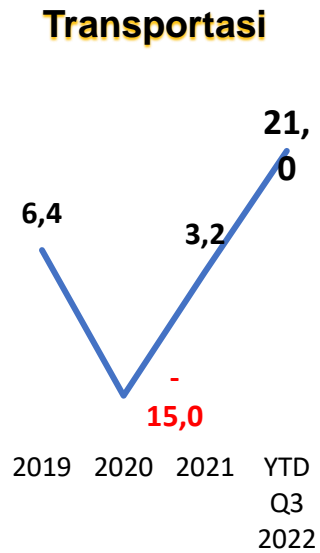
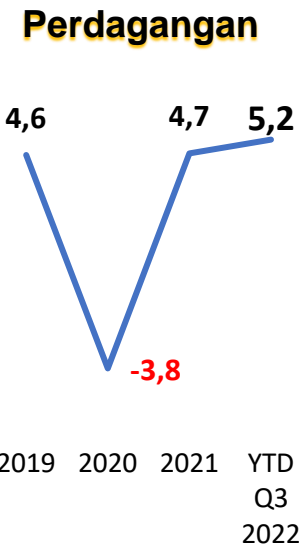
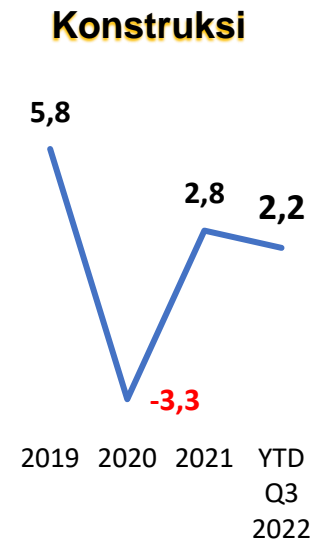
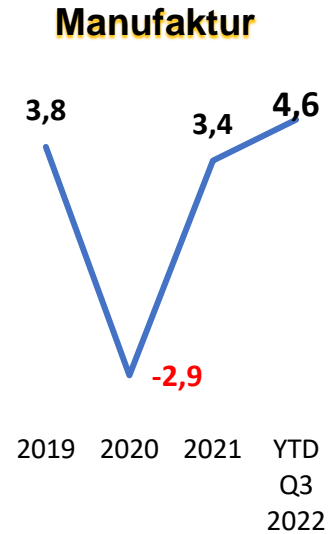
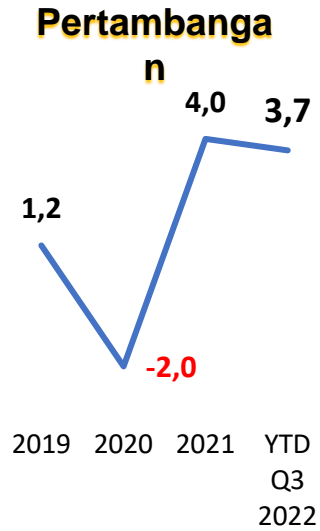
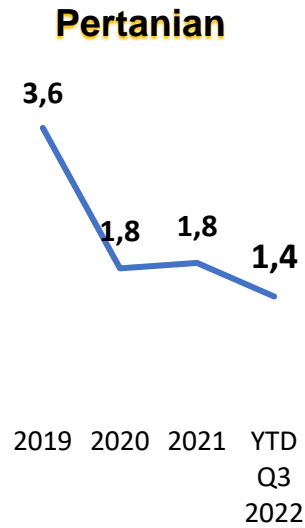


# PERTUMBUHAN SISI PRODUKSI (% , YOY)



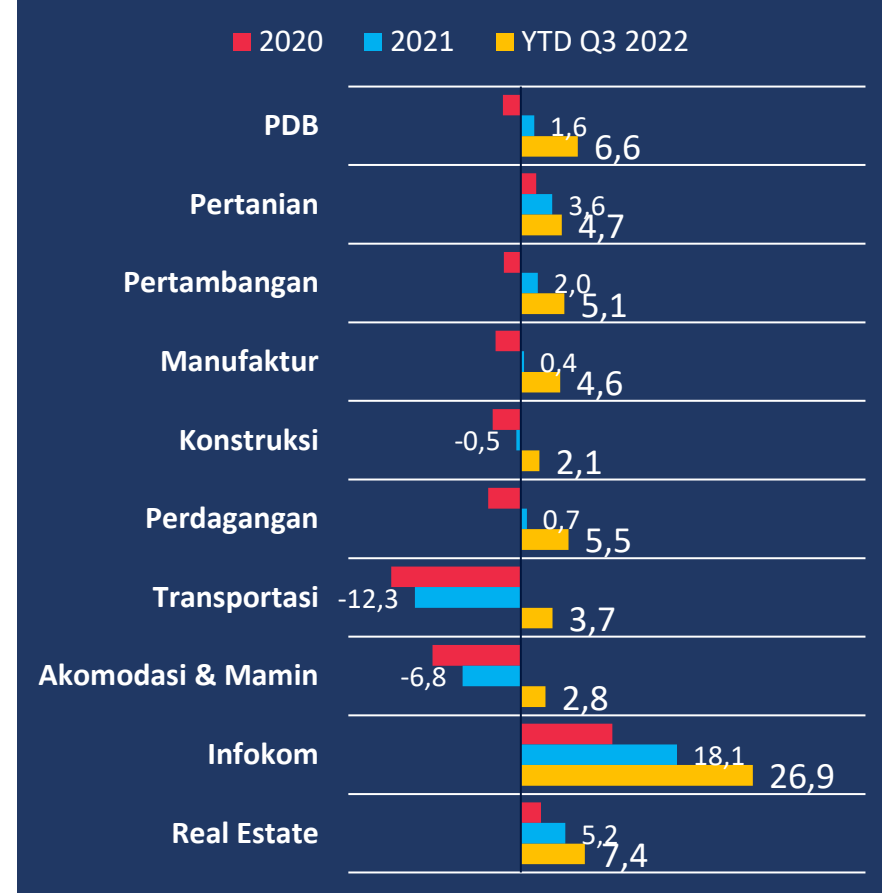
## PEMULIHAN EKONOMI TERJADI DI SEMUA SEKTOR (BROAD-BASED)

Sektor akomodasi mamin sudah mampu bangkit dari pandemi & tumbuh *double digit*



### LEVEL PDB RIIL TERHADAP 2019 (%)

2020 dan 2021 tahunan, 2022 Q1-Q3 kumulatif



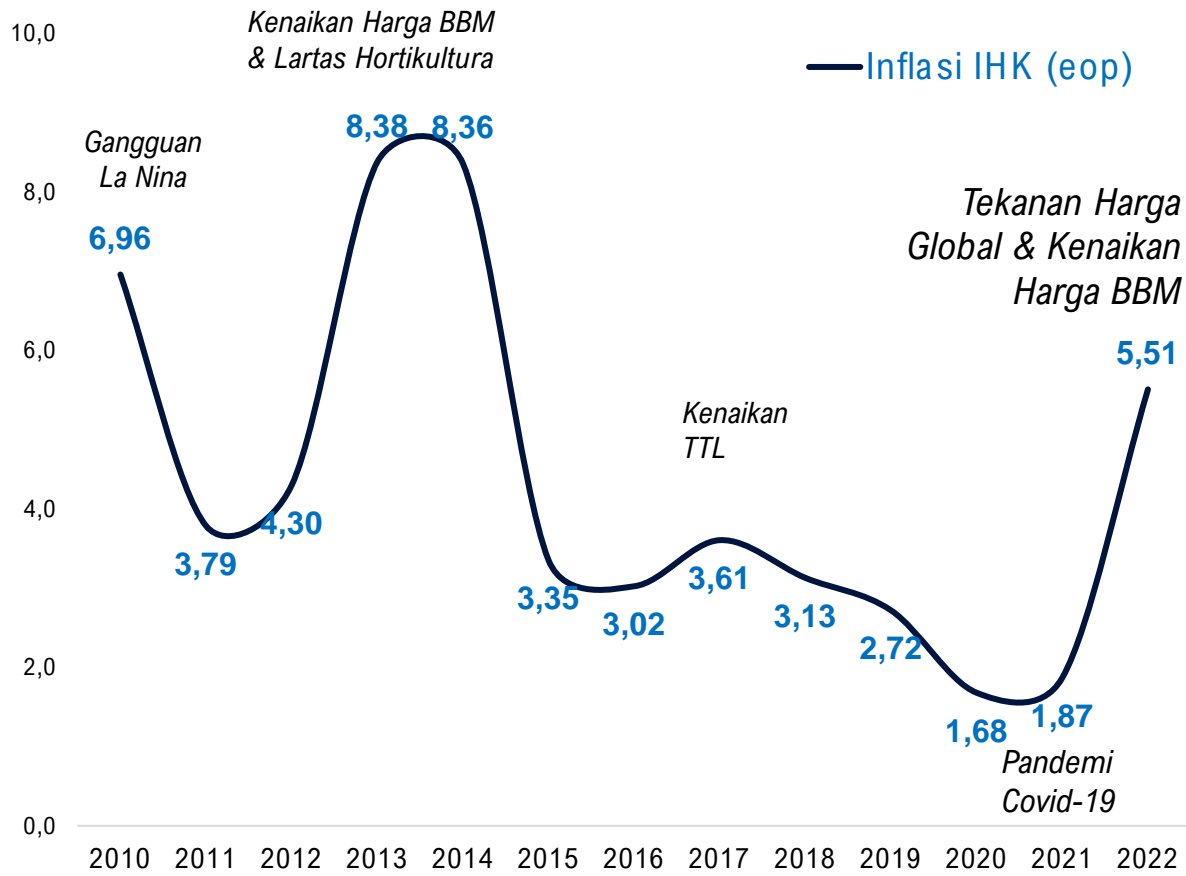
\*Kumulatif PDB Riil Q1-Q3 2022 Vs Q1-Q3 2019

# INFLASI DOMESTIK TERKENDALI

Didukung implementasi kebijakan terukur & penguatan sinergi

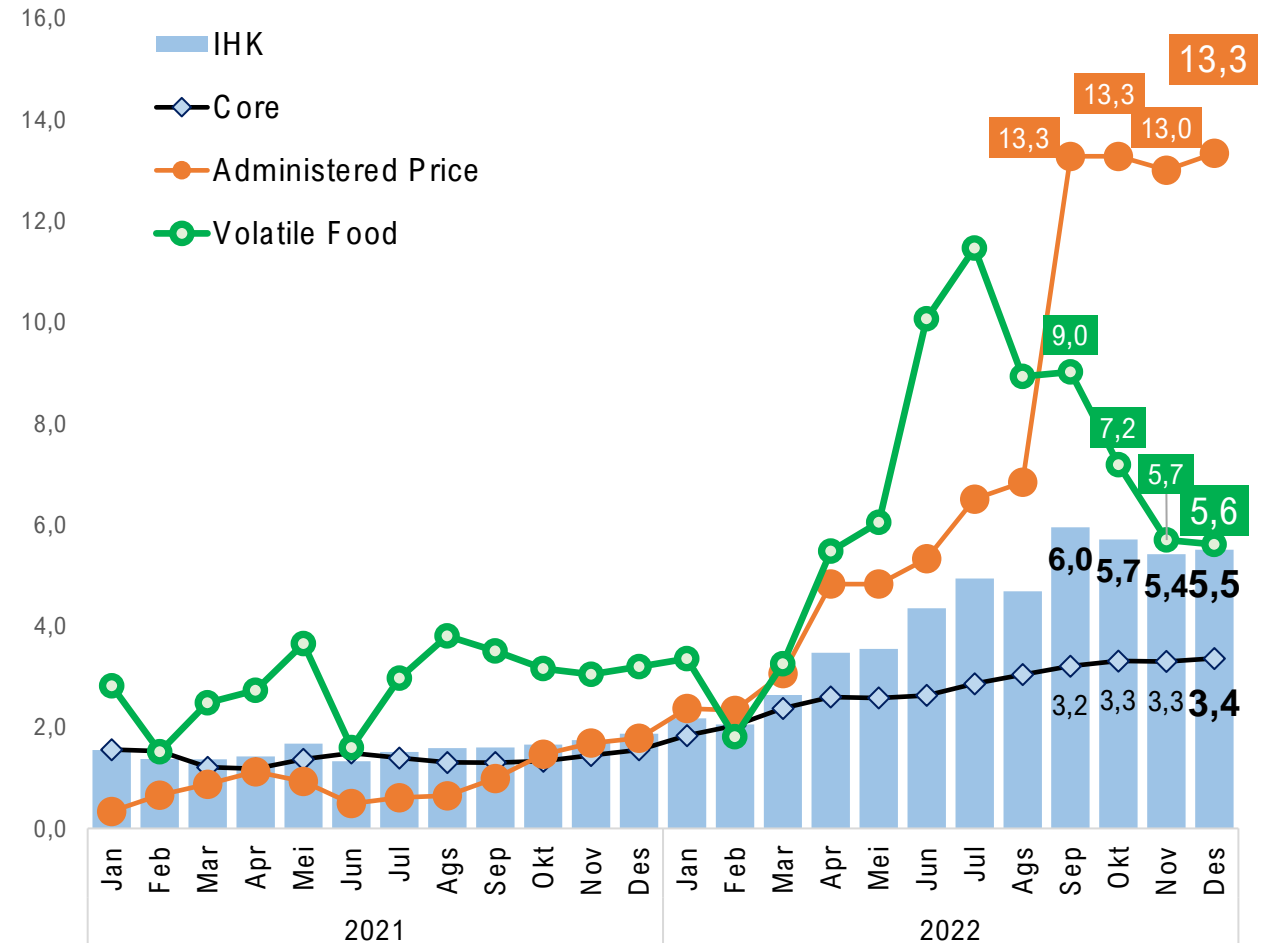
- Kebijakan **stabilisasi harga**
- Koordinasi **TPIP – TPID**
- Optimalisasi **APBN** sebagai *shock absorber*

Perkembangan Inflasi Tahunan 2010-2022 (% , yoy)



Sumber : BPS (data diolah)

Perkembangan Inflasi di Tahun 2022 (% , yoy)





BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

01

Perkembangan Perekonomian Global  
dan Domestik

02

**Capaian APBN 2022 & Kerangka  
APBN 2023**

03

Reformasi & Arah Kebijakan  
Perpajakan



# KEBIJAKAN FISKAL BEKERJA KERAS, RESPONSIF, & FLEKSIBEL DI MASA PANDEMI



Mengendalikan Covid-19, mengakselerasi pemulihan dan mendukung reformasi

## 2020 EXTRAORDINARY POLICY

- Perpu No.1/2020 → UU No.2/2020
- Stimulus penanganan Covid-19 dan Program PEN
- Pelebaran defisit APBN melebar 6,34% PDB

## 2021 PANDEMIC HANDLING & RECOVERY

- Fokus penanganan pandemi (vaksinasi & protokol kesehatan)
- Pemulihan ekonomi melalui PEN yang fleksibel dan akutabel
- Momentum reformasi (UU HPP, UU HKPD)

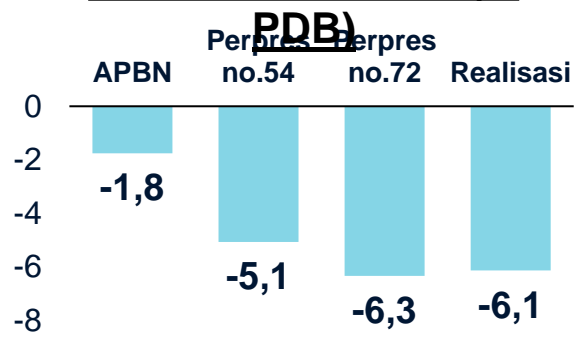
## 2022 ACCELERATE RECOVERY & REFORM POLICY

- Penguatan penanganan pandemi (akselerasi vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal)
- Mengakselerasi pemulihan ekonomi (keberlanjutan PEN)
- Efektivitas reformasi

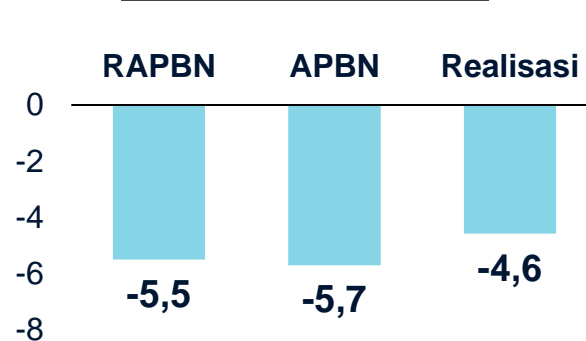
## 2023 HIGH QUALITY FISCAL CONSOLIDATION

- Mengembalikan defisit maksimal 3% PDB
- *Primary balance* menuju positif
- *Debt ratio* diupayakan menurun
- Risiko utang terkendali

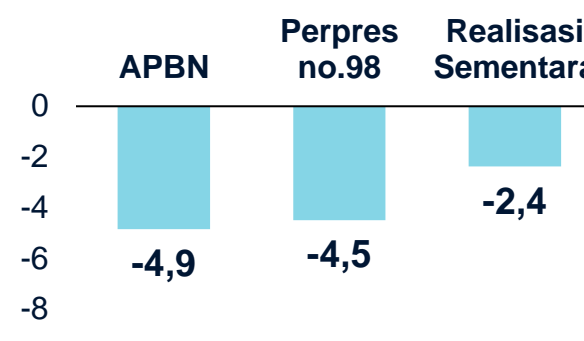
### Defisit APBN 2020 (%)



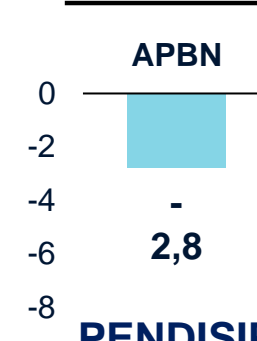
### Defisit APBN 2021



### Defisit APBN 2022



### Defisit APBN 2023



Anggaran PEN (Rp Tn)

Tahun	Anggaran (Rp Tn)
2020	405,
2021	695,
2022	575,

Tahun	Anggaran (Rp Tn)
2021	403,
2022	744,
2023	655,

Tahun	Anggaran (Rp Tn)
2022	396,7

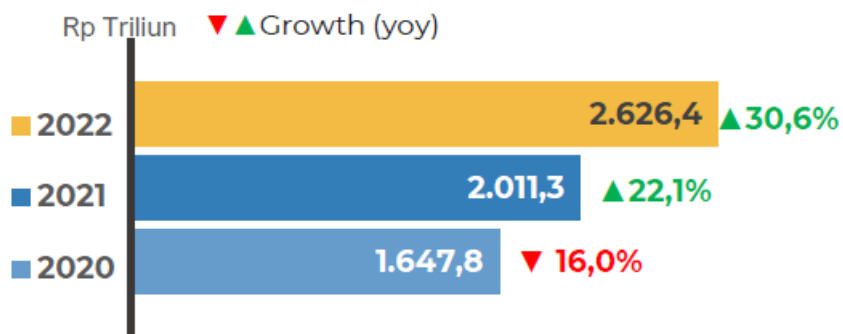
**PENDISIPLINAN FISKAL  
UNTUK  
KEBERLANJUTAN  
JANGKA PANJANG**

# APBN 2022: KINERJA SANGAT BAIK SEJALAN PEMULIHAN EKONOMI. BERFUNGSI OPTIMAL SEBAGAI *SHOCK ABSORBER*. MENJADI **PONDASI KUAT UNTUK 2023.**



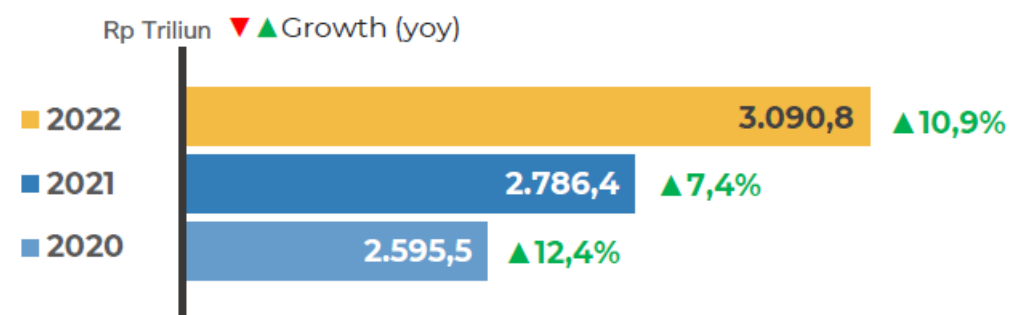
## PENDAPATAN NEGARA

Recovery lebih cepat dan harga komoditas mendorong peningkatan pendapatan negara



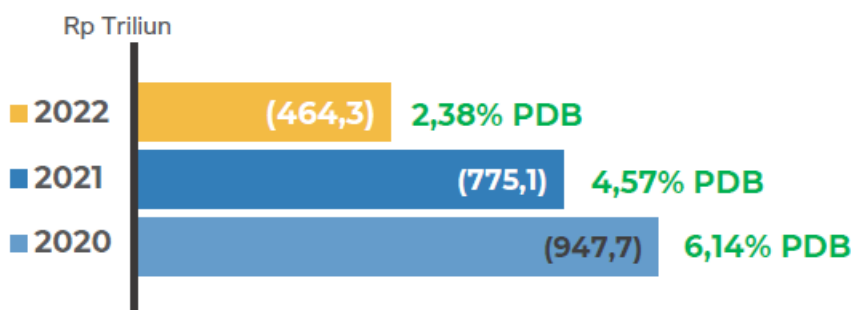
## BELANJA NEGARA

Tumbuh positif untuk mengendalikan pandemi, meredam gejala global dan mendorong pemulihan



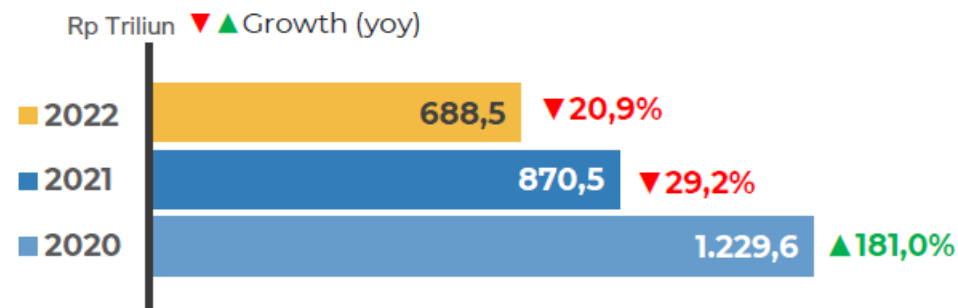
## DEFISIT APBN

Realisasi 2022 sebesar 2,38% PDB, menjadi fondasi konsolidasi fiskal tahun 2023



## PEMBIAYAAN UTANG (NETTO)

Dapat ditekan sejalan dengan pengendalian risiko yang semakin baik





# APBN 2023: OPTIMIS DAN WASPADA

Ditengah risiko tekanan geopolitik, ancaman resesi, dan persiapan Pemilu 2024



## OPTIMIS: KINERJA POSITIF PEREKONOMIAN

1. Pemulihan ekonomi menguat
2. Sektor strategis ekspansif
3. Kinerja konsumsi, investasi, & neraca perdagangan membaik
4. Laju inflasi moderat
5. Kinerja APBN 2022 sangat positif

## WASPADA: RISIKO KETIDAKPASTIAN

1. Hambatan ekonomi global
2. Tensi geopolitik mengganggu sisi suplai
3. Pengetatan kebijakan moneter global agresif
4. *Scarring effect* dampak pandemi

Modalitas:

**PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN**



### APBN SEBAGAI *SHOCK ABSORBER*

1. Mengendalikan Inflasi, menjaga daya beli
2. Menjaga momentum pemulihan ekonomi
3. Menjaga APBN tetap sehat



### MITIGASI RISIKO YANG LEBIH SOLID

1. Mengendalikan defisit dan utang
2. Menyediakan *buffer* dan fleksibilitas APBN
3. Bauran kebijakan fiskal, moneter & sektor keuangan
4. Mengendalikan risiko utang



### MENJAGA MOMENTUM TRANSFORMASI EKONOMI

1. Mendukung efektivitas reformasi fiskal
2. Mendukung sentra ekonomi baru dan pemerataan pembangunan
3. Menjaga terlaksananya program prioritas

# APBN 2023 DISUSUN DENGAN SEMANGAT OPTIMISME PEMULIHAN DAN TETAP ANTISIPATIF TERHADAP GEJOLAK EKONOMI GLOBAL



URAIAN (triliun rupiah)	2022	2023
	Realisasi Sementara	APBN
<b>Pendapatan Negara, a.l.</b>	<b>2.626,4</b>	<b>2.463,0</b>
• Perpajakan	2.034,5	2.021,2
• PNBP	588,3	441,4
<b>Belanja Negara</b>	<b>3.090,8</b>	<b>3.061,2</b>
• Belanja Pemerintah Pusat	2.274,5	2.246,5
a.l. Subsidi Energi dan Kompensasi	551,2	339,6
• Transfer Ke Daerah	816,2	814,7
<b>Keseimbangan Primer</b>	<b>(78,0)</b>	<b>(156,8)</b>
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(464,3)</b>	<b>(598,2)</b>
% thd PDB	(2,38)	(2,84)
<b>Pembiayaan Anggaran</b>	<b>583,5</b>	<b>598,2</b>

## ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2022 – 2023

**Inflasi**  
5,5% 3,6%

**Tk Suku Bunga SBN 10 th**  
7,05% 7,9%

**Pertumbuhan Ekonomi**  
5,1% - 5,3% 5,3%

**Harga Minyak (US\$/barel)**  
97 90

**Lifting Minyak (rbph)**  
615 660

**Nilai Tukar (Rp/US\$)**  
14.871 14.800

**Lifting Gas (rbsmph)**  
958 1.100

- Target Pendapatan Negara memperhitungkan moderasi harga komoditas dan penerimaan yang tidak berulang (a.l.PPS)
- Alokasi belanja negara diarahkan mendorong produktivitas dan melindungi masyarakat:
  - Dukungan anggaran yang memadai untuk menjaga daya beli masyarakat (a.l.subsidi energi& kompensasi)
  - Fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran tetap dilakukan
- Strategi Pembiayaan anggaran mengantisipasi tantangan volatilitas pasar keuangan global, risiko peningkatan biaya utang serta selesainya SKB BI



01

Perkembangan Perekonomian Global dan Domestik

02

Capaian APBN 2022 & Kerangka APBN 2023

03

**Reformasi & Arah Kebijakan Perpajakan**

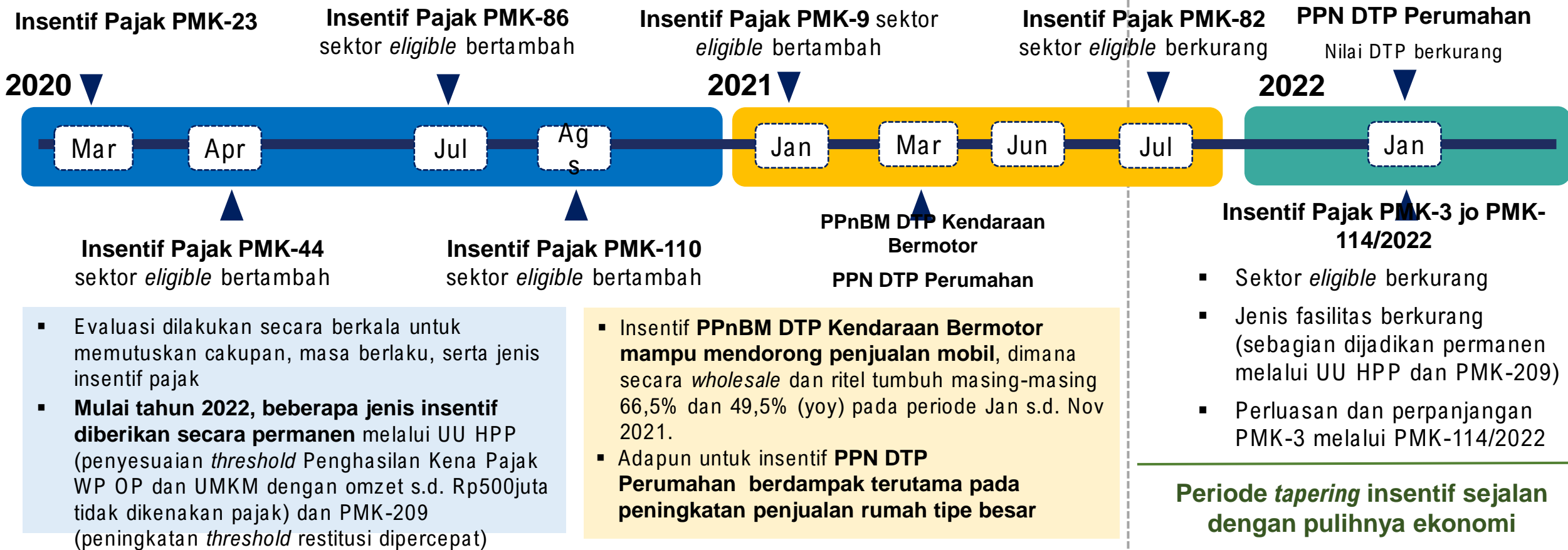




# INSENTIF PERPAJAKAN BERPERAN BESAR DALAM MENGAKSELERASI PEMULIHAN PADA SEKTOR-SEKTOR EKONOMI YANG TERDAMPAK PANDEMI



Periode jenis insentif dan sektor *eligible* meningkat untuk mendorong pemulihan ekonomi



- Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memutuskan cakupan, masa berlaku, serta jenis insentif pajak
- Mulai tahun 2022, beberapa jenis insentif diberikan secara permanen** melalui UU HPP (penyesuaian *threshold* Penghasilan Kena Pajak WP OP dan UMKM dengan omzet s.d. Rp500juta tidak dikenakan pajak) dan PMK-209 (peningkatan *threshold* restitusi dipercepat)

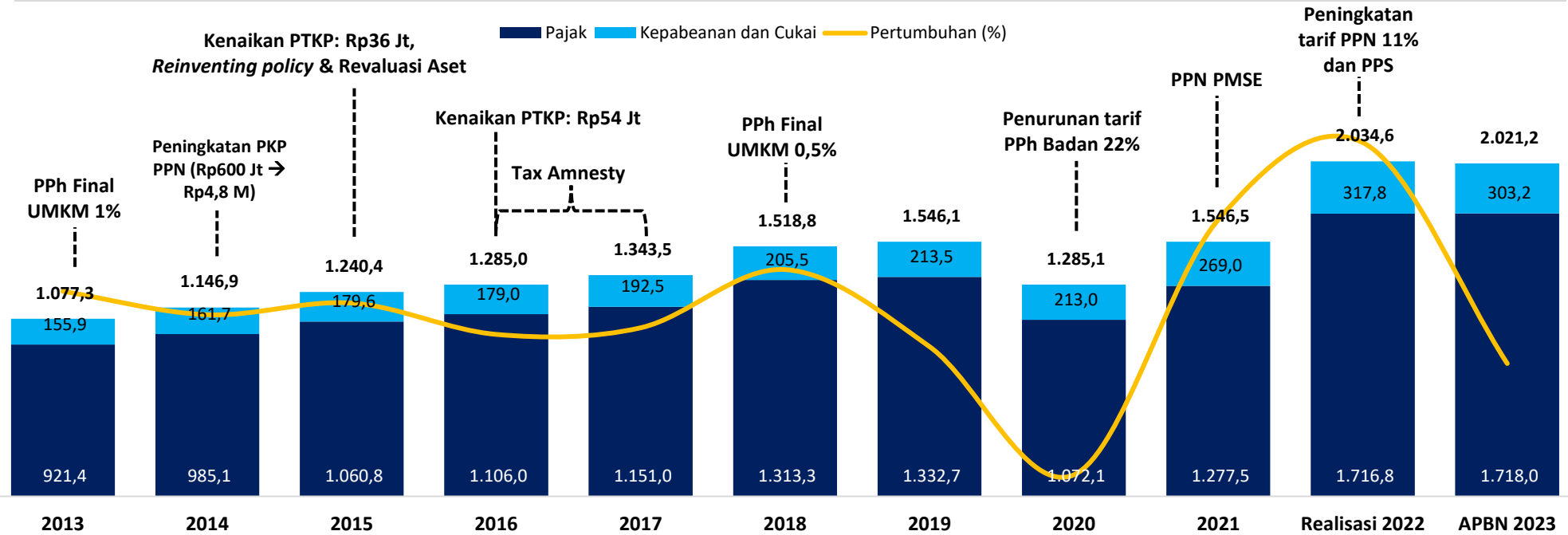
- Insentif **PPnBM DTP Kendaraan Bermotor mampu mendorong penjualan mobil**, dimana secara *wholesale* dan ritel tumbuh masing-masing 66,5% dan 49,5% (yoy) pada periode Jan s.d. Nov 2021.
- Adapun untuk insentif **PPN DTP Perumahan berdampak terutama pada peningkatan penjualan rumah tipe besar**

Dukungan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi juga diberikan melalui insentif perpajakan regular (non PEN) melalui kebijakan belanja perpajakan dimana sebagian besar diberikan kepada subjek pajak rumah tangga dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

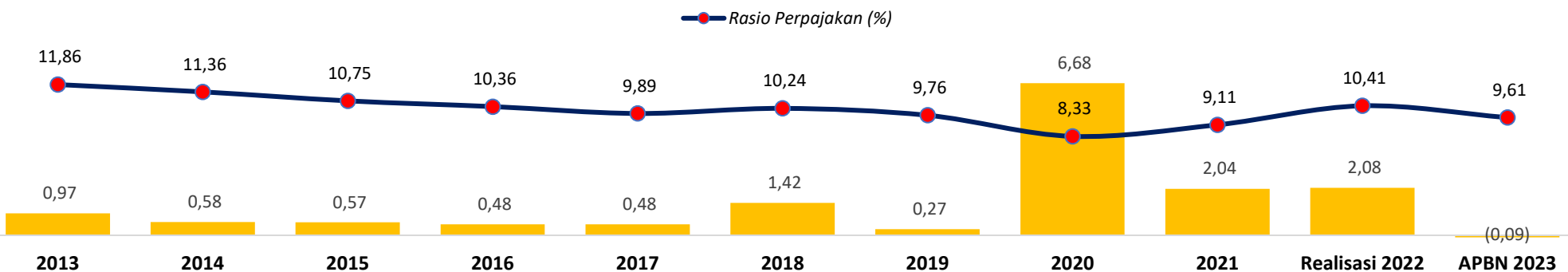
# PENERIMAAN PERPAJAKAN TERUS TUMBUH DAN MENUNJUKAN PEMULIHAN PASCA PANDEMI



## PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN (Rp Triliun)



## RASIO PERPAJAKAN DAN TAX BOUYANCY



- Realisasi perpajakan berfluktuatif mengikuti dinamika perekonomian, terutama harga komoditas;
- Tahun 2020, perpajakan turun signifikan akibat pandemi, namun tumbuh positif tahun 2021 seiring pulihnya perekonomian;
- Tahun 2022, didukung oleh pemulihan ekonomi yang semakin baik, kenaikan harga komoditas, serta pelaksanaan reformasi perpajakan, penerimaan perpajakan tumbuh hingga 31,4%;
- Seiring dengan moderasi harga komoditas, merupakan tantangan dalam mencapai target penerimaan perpajakan. Untuk itu reformasi perlu terus diperkuat.

# REFORMASI PERPAJAKAN PERLU TERUS DILANJUTKAN UNTUK MERESPON BERBAGAI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN



## MENUJU PAJAK YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL



### Reformasi Kebijakan

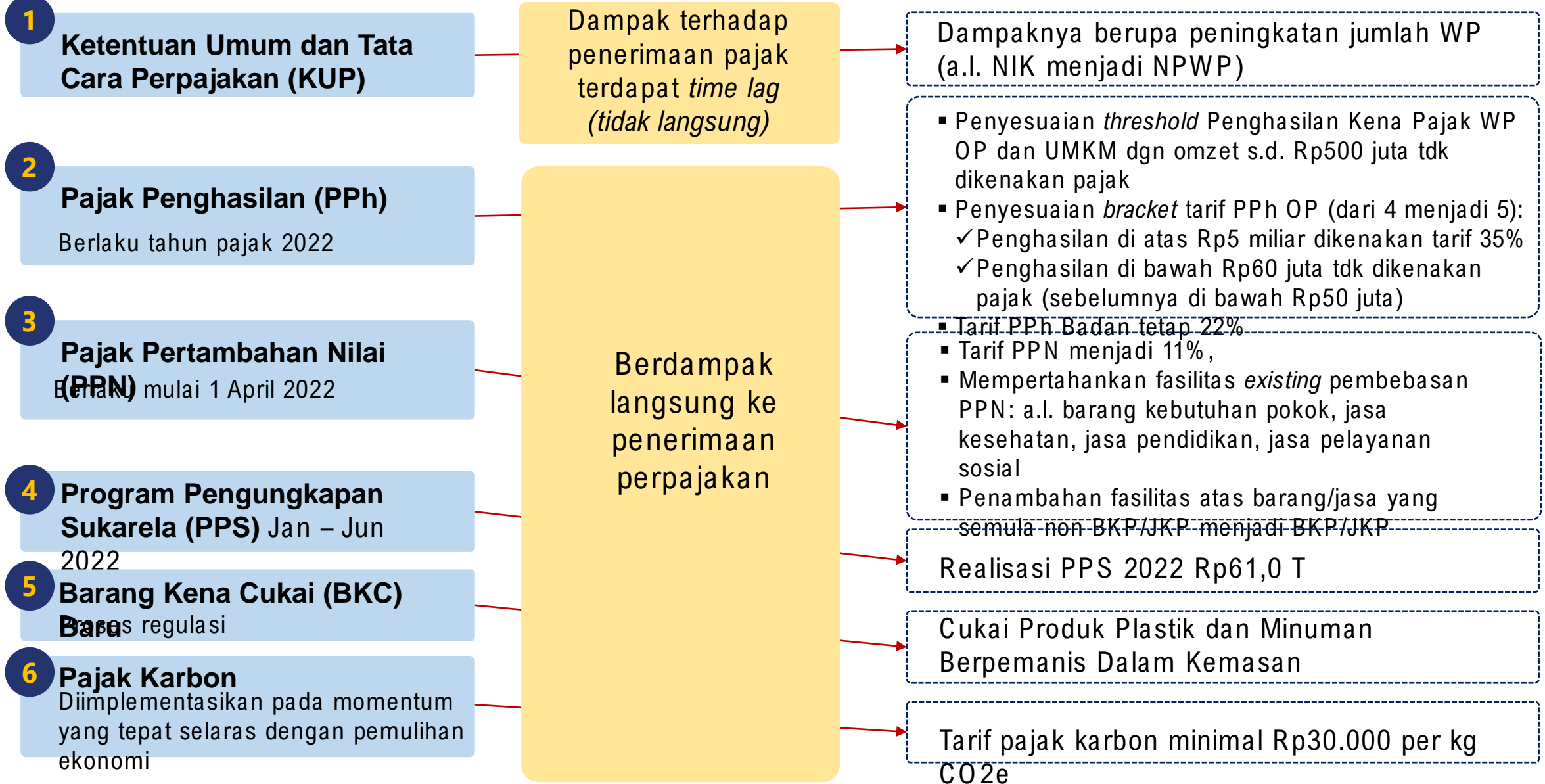
- Memperluas basis pajak
- Menjawab tantangan *competitiveness*
- Insentif terukur, efisien, adaptif dengan dinamika perpajakan global
- Insentif pajak fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan menyerap tenaga kerja
- Mengurangi distorsi dan *exemption* berlebihan
- Memperbaiki progresivitas pajak



### Reformasi Administrasi

- Administrasi perpajakan yang lebih *simple* dan efisien
- Menjamin kepastian hukum perpajakan
- Pemanfaatan data dan informasi keuangan secara optimal
- Adaptasi terhadap perkembangan struktur perekonomian termasuk perkembangan digital dan transaksi ekonomi
- Mengikuti tren dan *best practice* perpajakan global
- Kepatuhan pajak yang tinggi

# IMPLEMENTASI UU HPP TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI POSITIF DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN



# TANTANGAN PENCAPAIAN PERPAJAKAN TAHUN 2023



# KEBIJAKAN UMUM PERPAJAKAN 2023:

Optimalisasi Pendapatan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Ekonomi



Melanjutkan tren peningkatan pajak dengan **menjaga efektivitas implementasi UU HPP**



Memberikan **insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis** yang mempunyai *multiplier effect* yang kuat bagi perekonomian.



Upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dilakukan dengan tetap **memerhatikan daya beli masyarakat.**



Melakukan **penggalan potensi** dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak;



Melaksanakan optimalisasi perpajakan melalui **penguatan pengawasan dan penegakan hukum.**



Memastikan **pencapaian target penerimaan perpajakan dilakukan secara cermat dan hati-hati** agar konsolidasi fiskal dengan defisit APBN maksimal 3 % PDB tahun 2023 dapat berjalan dengan baik.

# KEBIJAKAN PAJAK 2023

## Optimalisasi Penerimaan Pajak Tetap Menjaga Iklim Investasi



Optimalisasi perluasan basis pemajakan

- Tindak lanjut program pengungkapan sukarela,
- Implementasi NIK sebagai NPWP



Penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan

- Implementasi penyusunan daftar prioritas pengawasan
- Prioritas pengawasan atas WP *high wealth individual* berserta WP grup dan ekonomi digital
- Persiapan implementasi *core tax system*
- Perluasan kanal pembayaran pajak
- Penegakan hukum yang berkeadilan
- Pemanfaatan kegiatan *digital forensic*



Percepatan reformasi bidang SDM, organisasi, proses bisnis dan regulasi

- Ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi



Insentif fiskal yang terarah dan terukur

# KEBIJAKAN KEPABEANAN & CUKAI 2023

Mendukung Kemudahan Logistik dan Perlindungan Masyarakat



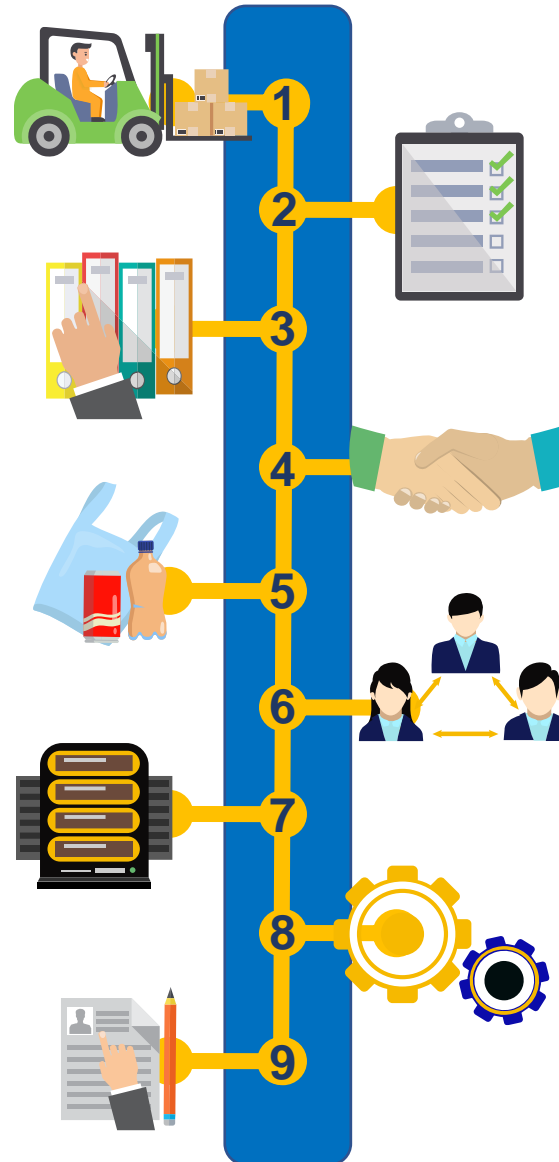
**Pengembangan ekosistem logistik nasional (NLE)** dalam rangka mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional

**Harmonisasi kebijakan** barang larangan dan/atau pembatasan dengan K/L terkait

**Ekstensifikasi dan intensifikasi** cukai dalam rangka mendukung implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan a.l. Cukai Produk Plastik dan Cukai MBDK yang diselaraskan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat

**Penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi** dalam rangka mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kepuasan pengguna jasa.

Pemberian **fasilitasi kepabeanan dan cukai** yang tepat sasaran melalui penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas, serta penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)



**Peningkatan efektivitas pengawasan** *pre-clearance*, *clearance*, dan *post-clearance* (audit) kepabeanan dan cukai dalam mendorong peningkatan basis penerimaan dan kepatuhan pengguna jasa

**Optimalisasi kerja sama internasional** di bidang kepabeanan dan cukai melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional

**Penataan manajemen sumber daya manusia** yang lebih transparan, adil, dan mendorong kredibilitas organisasi melalui pengembangan pola mutasi, pola karier dan manajemen talenta

**Penataan kelembagaan** unit pusat dan vertikal yang *agile* dan sesuai kebutuhan organisasi melalui pembentukan kantor baru, penyesuaian tipologi instansi vertikal, dan pembagian wilayah kerja





**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**TERIMA KASIH**

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI  
Gedung R.M. Notohamiprodjo,  
**Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat**

*<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id>*

